

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, WHISTLEBLOWING, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA**

(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul)

Andri Shofiana Khoiriyah

andrishofiana89@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing:

Dr. Ahim Abdurahim, M. Si., SAS., Ak., CA.

Abstract

This study aims to examine the effect of competence of personnel, whistleblowing, internal control system, organizational culture on prevention of fraud in village funds at Bantul district. This research is a quantitative research. Population of this research is villages in Bantul district which contains of 75 villages and 17 sub-district. The research sampling method use Slovin Technique with level of inaccuracy 10%. Then calculate proportional random sampling. The calculation result shows 43 villages from all the population amount. The data in this research are primary data. The data were obtained from questionnaire. The analysis technique which is used is multiple regression analysis with SPSS version 15. The result of research shows organizational culture give the positive and significant effect to prevention fraud, but competency personnel, whistleblowing, and internal control system don't give an effect on prevention fraud in village funds in Bantul District.

Keyword: competence personnel, whistleblowing, internal control system, organizational culture, prevention fraud, village fund

Pendahuluan

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa guna pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memiliki program NAWA CITA mengenai anggaran dana desa dengan tujuan untuk memajukan pembangunan desa sebagai sasaran utamanya. Keputusan pemerintah akan program ini disambut baik oleh masyarakat dengan harapan desa tersebut dapat memiliki sarana maupun prasarana yang lebih memadai.

Program pemerintah mengenai dana desa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yang tertera pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Desa tidak dianggap lagi sebagai obyek perubahan dan pembangunan, akan tetapi sebagai subjek perubahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indrawati, 2017)

Keterlibatan antara pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat dalam program dana desa ini diharapkan aparatur desa yang diberikan amanat oleh pemerintah pusat sebagai pihak pengelola dana desa memberikan sikap yang transparan dan akuntabilitas. Dimulai dari penyusunan anggaran dana desa yang dibutuhkan, hingga pengelolaan dana desa tersebut sesuai dengan pengajuan anggaran dana desa. Aparatur desa diharapkan melakukan pelaporan secara transparan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dana desa (Atmadja & Saputra, 2017)

Akan tetapi sejak tahun 2015 hingga 2019 sekarang, terdapat ratusan laporan yang diterima oleh KPK mengenai kasus tindakan korupsi pada dana desa. Begitu juga dengan wilayah Yogyakarta yang tercatat dalam kasus penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi di wilayah Yogyakarta tidak hanya di Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi di Sleman juga terdapat kasus fraud tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh *ICW (Indonesia Corruption Watch)* bahwa saat ini kasus korupsi telah mulai memasuki wilayah desa.

Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang bergantung pada pelayanan publik, bahkan masyarakat dihadapkan dengan pembayaran suap agar mereka mendapatkan hak (Quah, 2011). Kasus korupsi penyalahgunaan dana desa sebagian besar dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan dana desa, pemerintah berupaya dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan fraud. Selain pemeriksaan mengenai pengelolaan dana desa, faktor lain yang dapat mencegah terjadinya fraud yaitu faktor internal yang berasal dari aparat maupun organisasi seperti, kompetensi yang dimiliki aparat, system whistleblowing, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem *Whistleblowing*, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Di Kabupaten Bantul”.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

***Attribution Theory* (Teori Atribusi)**

Teori atribusi merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi menjelaskan mengenai seseorang berperilaku dan dari perilaku tersebut, seseorang memiliki alasan untuk melakukan tindakan tersebut. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider menjelaskan bahwa terdapat dua alasan dari tindakan seseorang, yaitu alasan dari dalam diri seseorang dan alasan yang berasal dari luar diri seseorang tersebut. Teori atribusi juga disampaikan oleh Calder (1977) yang digambarkan sebagai kesimpulan atau menyimpulkan mengenai suatu perilaku yang tidak sesuai.

Teori Stewardship

Menurut Raharjo (2007) yang menjelaskan bahwa teori stewardship merupakan suatu usaha manajer dalam berperilaku dan menyesuaikan kepentingan bersama. Akan tetapi, jika kepentingan bersama antara steward dengan pemangku kepentingan tidak sama, maka steward akan tetap bekerja dan tidak menentang.

Menurut Davis, dkk (1997)kepentingan bersama merupakan pertimbangan ketika akan mncapai tujuan dari suatu organisasi. Teori stewardship ini dapat diasumsikan memiliki hubungan antara keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan pemiliknya. Menurut Keay (2017) menjelaskan bahwa teori stewardship berupaya menunjukkan konsep peran dari pemimpin yang akan mempertimbangkan aturan perlunya akuntabilitas. Hal ini berdasarkkan pada kepercayaan dan profesionalisme pemimpin.

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud*

Kompetensi adalah suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).

Penelitian oleh Wonar, dkk (2018)menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil signifikan positif. Artinya kompetensi aparatur desa yang baik dapat mencegah terjadinya *fraud*. Begitupun dengan penelitian Atmadja dkk (2017) yang melakukan pengujian kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian kompetensi aparatur positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Kemudian Rahayu dkk (2019) dan Wahyuni & Nova (2019) melakukan penelitian mengenai kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan yang hasilnya juga sejalan dengan penelitian sebelumnya. Kompetensi aparatur juga berkaitan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan memiliki alasan yang berasal dari diri maupun luar diri seseorang. Alasan internal dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

Dari penjelasan tersebut, maka pada penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

2. Pengaruh Whistleblowing terhadap pencegahan *fraud*

Basri dkk (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari *whistleblowing* Secara tidak langsung, efek dari *whistleblowing* sendiri ternyata sangat besar, contohnya yaitu tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Terdapat juga alasan seorang whistleblower mengungkapkan atau disebut meniup peluit karena terdapat perasaan takut kepada pihak atasan mereka.

Kummer dkk (2015) menyatakan pada risetnya mengenai suatu mekanisme yang dilakukan guna mendeteksi kecurangan. Pada riset tersebut, instrument yang sering muncul dan sangat efektif yaitu kebijakan pendendalian penipuan, kebijakan whistle-blower dan rincian-rincian risiko penipuan yang mungkin akan terjadi.

Namun, tidak selamanya *whistleblowing* merupakan hal yang ditakuti oleh pihak atasan. Menurut Francis dkk (2015) juga melakukan penelitian yang tujuannya guna memberikan pandangan dua sisi mengenai *whistleblowing*. Pertama yaitu dengan argument-argument yang sopan. Kedua memberikan ruang *whistleblowing* dari sudut pandang whistle-blower. Ketiga memberikan masukan-masukan mengenai potensi meniup-peluit.

Widiyarta dkk (2017) melakukan penelitian mengenai *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dan menunjukkan hasil positif signifikan. Menurut Widiyarta dkk. (2017) jika sistem *whistleblowing* berjalan dengan lancar dan baik, maka secara tidak langsung akan berpengaruh mencegah terjadinya *fraud*. Maka, suatu organisasi akan terbebas dari *fraud* atau kecurangan dengan salah satu faktor yaitu sistem *whistleblowing* berjalan dengan baik. Gaurina dkk (2017) melakukan penelitian mengenai *whistleblowing* dengan sample karyawan Bali Hai Cruises yang menunjukkan hasil positif signifikan.

Karyawan yang bekerja di Bali Hai Cruises tersebut beranggapan mengenai persepsi mengenai *whistleblowing* dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Menurut Saud (2016) sikap positif dari diri seseorang mampu menjadikan kecenderungan seseorang guna melakukan *whistleblowing*, maka kemungkinan besar dari kecenderungan tersebut seseorang akan melakukan *whistleblowing* semakin besar niat seseorang untuk *whistleblowing*. Teori atribusi yang menjelaskan bahwa alasan seseorang melakukan suatu tindakan dapat berasal dari dalam diri. Seperti halnya sikap dan dorongan diri seseorang ketika akan melakukan pelaporan penyalahgunaan atau menjadi whistleblower. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu

H2: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *fraud*

Wonar dkk (2018) melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian internal dengan hasil tidak signifikan. Peneliti memberikan penjelasan bahwa pada penelitian yang dilakukan ini menunjukkan hasil tidak signifikan karena aparatur desa sebelum mencari pegawai tidak meninjau latar belakang pegawai tersebut, melainkan seperti jual beli yang ditentukan oleh pimpinan sehingga para pegawai sungkan ketika para pimpinan melakukan kesalahan maupun berbuat kecurangan.

Widiyarta dkk. (2017) dan Atmadja & Saputra (2017) melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dan menunjukkan hasil positif. Ini berarti bahwa sistem pengendalian internal yang baik akan mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian yang sejalan hasilnya positif signifikan yaitu Wardana dkk (2017) dan Suastawan dkk (2017) mengenai sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Teori atribusi juga menjelaskan mengenai tindak perilaku seseorang berasal dari dorongan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sistem pengendalian internal dapat dikatakan sebagai faktor pendorong tindakan

seseorang karena secara tidak langsung seseorang berada pada lingkup kerja yang memiliki pengaruh terhadap tindakan seseorang. Karena hasil penelitian yang selaras, maka peneliti ingin menguji lagi dan mengajukan hipotesis:

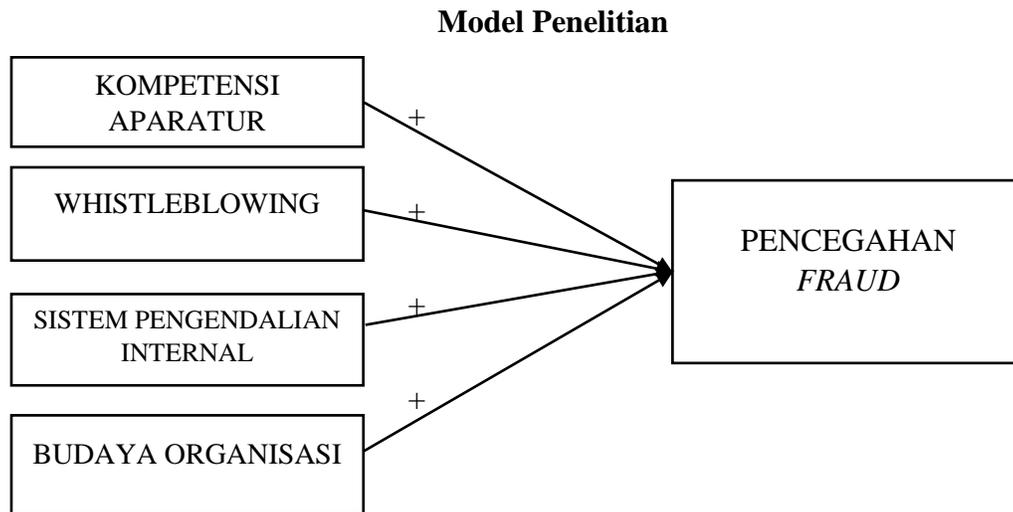
H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*

Widiyarta dkk (2017) melakukan penelitian mengenai budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Begitu juga dengan Zelmiyanti & Anita (2015) melakukan penelitian mengenai budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dan menunjukkan hasil yang sama yaitu positif signifikan.

Kedua penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian oleh Suastawan dkk (2017) mengenai budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Mereka beranggapan bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi dari eksternal diri sendiri. Budaya organisasi dapat dikatakan sebagai faktor internal dikarenakan budaya pada organisasi atau lingkup kerja secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap seseorang. Maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H4: Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.



METODE PENELITIAN

A. Objek atau Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna memberikan bukti empiris bahwa kompetensi aparatur, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Objek pada penelitian ini adalah beberapa desa di wilayah Kabupaten Bantul. Subjek dari penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan aparat desa yang mengelola dana desa.

B. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dengan skala likert 5. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif berupa angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar di beberapa desa di wilayah Kabupaten Bantul.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini yaitu desa-desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah desa yang berada di wilayah

Kabupaten Bantul sebanyak 75 desa. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel yaitu desa. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti menggunakan rumus Slovin (Saputra dkk 2019) :

$$\text{Rumus Slovin } n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n : Besar sampel

N : Ukuran Populasi

E : Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir maupun diinginkan pada penelitian ini. ($e=10\%$)

Dari jumlah populasi dengan tingkat kelonggaran ketidakteelitian sebesar 10%, maka dapat diketahui jumlah sampel minimal sesuai dengan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{75}{75 \times (0,1)^2 + 1} = 42,8571$$

Berdasarkan perhitungan rumus slovin diatas, maka diketahui bahwa jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42,8571 yang dibulatkan menjadi 43 responden.

Kemudian untuk mengetahui jumlah pembagian sampel masing-masing desa dengan menggunakan proportional random sampling Widiyarta dkk., (2017). Hal ini dilakukan karena jumlah desa di setiap kecamatan relatif berbeda, sehingga untuk mengetahui jumlah sampel setiap kecamatan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{x}{N} \times N1$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang digunakan setiap strata.

N = Ukuran populasi

x = ukuran populasi pada setiap strata

N1 = sampel

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden perangkat desa yakni kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pendamping aparatur desa, dan pihak yang ikut mengelola dana desa yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

a. Kompetensi Aparatur

Atmadja & Saputra, (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan memadai apabila kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran pada tingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggungjawaban dilakukan dengan baik dan terhindar dari tindak penyalahgunaan. Kompetensi aparatur pada penelitian ini diukur dengan skala likert. Kuesioner ini diperoleh dari Atmadja & Saputra, (2017), Widiyarta dkk., (2017), Saputra dkk., (2019), dan di modifikasi oleh Andri Shofiana Khoiriyah.

b. Whistleblowing

Persepsi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa yaitu merupakan suatu pandangan seseorang terhadap penerapan pelaporan tindak pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dalam pengelolaan dana desa. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari variabel *whistleblowing* fokus mengenai penerapan *whistleblowing*, analisis upaya pencegahan *fraud* yang diterapkan, sistem pada pelaporan *whistleblowing*, perlindungan yang diberikan terhadap *whistleblower*. *Whistleblowing*

diukur menggunakan skala likert 5 poin. Kuesioner penelitian ini diadopsi dari penelitian Widiyarta dkk., (2017)

c. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yaitu suatu sistem yang diterapkan oleh pemimpin pada suatu organisasi guna mengontrol organisasi tersebut dalam proses mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, ketaatan terhadap hukum yang berlaku, dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan (Widiyarta dkk 2017).Guna mencegah terjadinya *fraud*, maka strategi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adalah pemerintah desa harus membangun Sistem Pengendalian Internal yang meliputi *Soft Control* dan *Hard Control*. *Wonar*. Pertanyaan pada sistem pengendalian internal meliputi beberapa indikator yaitu: lingkungan pengendalian, perilaku resiko, informasi dan komunikasi, dan aktivitas-aktivitas pengendalian. Sistem pengendalian internal pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 .Kuesioner pada penelitian ini diadopsi dari penelitian Kristiana dkk, (2017) Zelmiyanti & Anita, (2015) , dan Widiyarta dkk., (2017).

d. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yaitu suatu norma, nilai, asumsi, maupun kepercayaan yang terbentuk dalam suatu organisasi dan disetujui oleh seluruh anggota organisasi sebagai acuan dalam berorganisasi ketika melakukan aktivitas baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Budaya organisasi juga dikatakan sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain (Suastawan dkk 2017). Pada penelitian ini berfokus pada beberapa indikator mengenai budaya organisasi yaitu: inisiatif individu, arahan, dukungan, komunikasi, komitmen, dan ketulusan yang diukur dengan skala likert. Kuesioner yang

digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Widiyarta dkk., (2017).

2. Variabel Dependen

a. Pencegahan Fraud

Variabel Terikat atau *Dependent Variable* adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas, dan bisa dikatakan akibat dari pengaruh tersebut. Pada penelitian ini menggunakan variabel pencegahan *fraud* sebagai variabel terikat.

Pencegahan kecurangan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan guna meminimalkan faktor-faktor penyebab kecurangan dengan cara mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Pencegahan *fraud* pada penelitian ini berfokus pada jenis-jenis *fraud* dengan indikator transparan, akuntabilitas, demokratis, efektif dan efisien, dan saling percaya.

F. Uji kualitas instrument dan data

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data pada penelitian ini menggunakan pengujian validitas dan reabilitas.

a. Uji validitas merupakan suatu pengujian guna menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat digunakan apa yang seharusnya akan diukur. Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode *Kaise Meyer Olkin Measure of Sampling Adeuacy (KMO MSA)*. Untuk mengetahui hasil dari metode tersebut dapat dilihat dari *Output KMO* dan *Barlett's test*. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui hasil dari pengujian uji validitas apabila nilai dari $KMO > 0.5$, dan *factor loading* $>0,5$ dapat dikatakan bahwa instrument tersebut valid (Nazaruddin & Basuki, 2015).

b. Uji reabilitas merupakan suatu pengujian pada kuesioner yang dilihat dari reliabel jawaban responden tersebut konsisten maupun stabil dari waktu ke waktu. Untuk hasil uji reabilitas dapat dilihat dari nilai

Cronbach Alpha. Apabila nilai koefisien *alpha* > 0.50 maka dapat dikatakan bahwa instrument tersebut reliabel (Nazaruddin & Basuki 2015).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan pengujian normalitas, multikolineralitas, heteroskedastisitas, dan linearitas.

- a. Uji normalitas merupakan suatu pengujian mengenai model regresi. Pada pengujian ini variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil dari pengujian ini akan dikatakan normal jika nilai residual yang dihasilkan > nilai signifikansi (0,05) (Nazaruddin & Basuki, 2015).
- b. Uji multikolinieritas yaitu suatu pengujian guna mengetahui deteksi gejala korelasi antar individu independent. Hasil dari pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *VIF* atau *Variance Inflation Factors* dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *VIF* > 10 dan nilai *tolerance* <0,10 maka penelitian tersebut terkena multikolinieritas dan sebaliknya maka penelitian tersebut bebas dari multikolinieritas (Nazaruddin & Basuki, 2015).
- c. Uji heteroskedastisitas yaitu suatu pengujian apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu dengan lainnya yang disebut homoskedastisitas dan sebaliknya jika varians tersebut berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Nazaruddin & Basuki (2015) menyatakan bahwa suatu model regresi dapat dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai sig lebih besar dari 0,05.

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan menggunakan pengujian Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi R^2 , dan Uji Statistik Parsial (Uji t).

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan suatu pengujian guna memecahkan rumusan masalah yang ada. Adapun model analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi aparatur, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Untuk persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:

$$PF = \alpha + \beta_1KA + \beta_2WO + \beta_3SPI + \beta_4BO + e$$

b. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan yaitu suatu langkah pengujian guna mengetahui seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independent. Hasil pengujian ini dilihat dari nilai Adjusted R square dan R square (R^2).

c. Uji Statistik Parsial (uji t)

Uji parsial atau uji t ini merupakan suatu pengujian guna menegetahui pengaruh di setiap variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dan nilai Unstandardized Coefficients β . Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai sig < (0,05) dan nilai Unstandardized Coefficients β searah dengan hipotesis yang diturunkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Maksimum	Minimum	Mean	Median	Standar Deviasi
Kompetensi Aparatur (X1)	70	49	33	42.09	42.00	2.842
<i>Whistleblowing</i>	70	39	25	32.19	32.00	2.688
Sistem Pengendalian Internal	70	58	40	50.73	50.00	3.579
Budaya Organisasi	70	80	61	67.94	67.00	4.612
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	70	85	66	73.93	74.00	5.170
Valid N (listwise)						

Sumber: *Output SPSS*, 2019

Berdasarkan dari tabel 4.3 di atas bahwa data variabel Kompetensi Aparatur (X1) yang diperoleh dari 70 responden memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 49, nilai terendah (minimum) sebesar 33, nilai rata-rata (mean) sebesar 42.09, nilai tengah (median) sebesar 42.00 dan standar deviasi sebesar 2.842. Hasil dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel kompetensi aparatur terhadap nilai rata-rata sebesar 2.842.

Data variabel *whistleblowing* (X2) yang diperoleh dari 70 responden memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 39, nilai terendah (minimum) sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 32.19, nilai tengah (median) sebesar 32.00 dan standar deviasi sebesar 2.688. Hasil dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel *whistleblowing* terhadap nilai rata-rata sebesar 2.688.

Data variabel sistem pengendalian internal (X3) yang diperoleh dari 70 responden memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 58, nilai terendah (minimum) sebesar 40, nilai rata-rata (mean) sebesar 50.73, nilai tengah (median)

sebesar 50.00 dan standar deviasi sebesar 3.579. Hasil dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel sistem pengendalian internal terhadap nilai rata-rata sebesar 3.579.

Data variabel budaya organisasi (X4) yang diperoleh dari 70 responden memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 80, nilai terendah (minimum) sebesar 61, nilai rata-rata (mean) sebesar 67.94, nilai tengah (median) sebesar 67.00 dan standar deviasi sebesar 4.612. Hasil dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel budaya organisasi terhadap nilai rata-rata sebesar 5.675.

Data variabel pencegahan *fraud* (Y) yang diperoleh dari 70 responden memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 85, nilai terendah (minimum) sebesar 66, nilai rata-rata (mean) sebesar 73.93, nilai tengah (median) sebesar 74.00 dan standar deviasi sebesar 5.170. Hasil dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel pencegahan *fraud* terhadap nilai rata-rata sebesar 5.170.

2. Uji Validitas

Uji validitas dengan metode *Kaise Meyer Olkin Measure of Sampling Adeuacy (KMO MSA)*. Untuk mengetahui hasil dari metode tersebut dapat dilihat dari *Output KMO* dan *Barlett's test*. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui hasil dari pengujian uji validitas apabila nilai dari $KMO > 0.5$, dan *factor loading* $> 0,5$ dapat dikatakan bahwa instrument tersebut valid.

Variabel Kompetensi Aparatur menunjukkan nilai KMO .746 dan *factor loading* diantara 0.536 - 0.663, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Variabel *Whistleblowing* memiliki nilai KMO sebesar .849 dan *factor loading* menunjukkan nilai diantara 0.526 – 0.809 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai KMO sebesar .722 dan *factor loading* menunjukkan nilai diantara 0.515 – 0.665 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Budaya organisasi memiliki nilai

KMO sebesar .804 dan *factor loading* menunjukkan nilai diantara 0.540 – 0.783 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Variabel Pencegahan Fraud memiliki nilai KMO sebesar .810, dan *factor loading* menunjukkan nilai diantara 0.535 – 0.721 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

3. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat pengukuran guna menilai konsistensi dari jawaban responden dari waktu ke waktu berdasarkan butir pertanyaan dalam kuesioner dengan melihat nilai Cronbach's alpha dengan taraf signifikan 5 %.

Variabel kompetensi aparatur memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,808, variabel *whistleblowing* memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,855, variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,830, variabel budaya organisasi memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,901, dan variabel pencegahan *fraud* memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,909. Diketahui secara keseluruhan variabel di atas memiliki nilai *Cronbach Alpha* diatas atau sama dengan 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan-pertanyaan dalam kelima variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.761

Sumber: *Output SPSS,2019*

Berdasarkan tabel 4.10 dilihat dari nilai *Asymp Sig (2-tailed)* > 0.05 memiliki nilai 0,761 lebih besar dari *alpha* ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat

dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

variabel kompetensi aparatur memiliki nilai *VIF* sebesar $1,466 < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,682 > 0,1$; variabel *whistleblowing* memiliki nilai *VIF* sebesar $1,141 < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,876$; variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *VIF* sebesar $1,234 < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,811$; dan variabel budaya organisasi memiliki nilai *VIF* sebesar $1,426 < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,701$. Dari tabel hasil uji multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai *Sig* Kompetensi Aparatur $0,644$, nilai *sig Whistleblowing* $0,332$, nilai *sig Sistem Pengendalian internal* $0,214$, dan nilai *sig Budaya organisasi* $0,576$. Seluruh variabel menunjukkan hasil lebih besar dari $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda, maka model persamaan regresi linear berganda yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$PF = 13,200 + 0,079 KA + 0,328 WO + (-0,062) SPI + 0,736 BO + e$$

Menurut model persamaan regresi linear berganda di atas, diperoleh nilai konstanta sebesar $13,200$. Artinya bahwa apabila Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing*, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi dianggap

bernilai 0 (nol) atau konstan, maka Pencegahan *Fraud* akan meningkat sebesar 13,200.

Koefisien regresi pada variabel independen Kompetensi Aparatur yaitu sebesar 0,079. Hal ini berarti bahwa variabel independent Kompetensi Aparatur (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Pencegahan *Fraud* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,079 atau sebesar 7,9% dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan.

Koefisien regresi pada variabel independen *Whistleblowing* yaitu sebesar 0,328. Hal ini berarti bahwa variabel independent *Whistleblowing* (X2) mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Pencegahan *Fraud* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,328 atau sebesar 32,8% dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan.

Koefisien regresi pada variabel independen Sistem Pengendalian Internal yaitu sebesar 0,062 bertanda negatif. Nilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan antara Sistem Pengendalian Internal dengan Pencegahan *Fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent Sistem Pengendalian Internal (X3) mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Pencegahan *Fraud* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,062 atau sebesar 6,2% dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan.

Koefisien regresi pada variabel independen Budaya Organisasi yaitu sebesar 0,736. Hal ini berarti bahwa variabel independen Budaya Organisasi (X4) mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Pencegahan *Fraud* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,736 atau sebesar 73,6% dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai Adjusted R Square (R^2) yaitu sebesar 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa 44,4% variabel Pencegahan *Fraud* dapat

dijelaskan oleh 4 (empat) variabel independent yaitu Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing*, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi. Selebihnya akan dijelaskan oleh variabel lain di luar model dari penelitian ini sebesar 55,6%.

Uji Simultan (F)

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 14,794 dan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,000 < \alpha (\alpha = 0,05)$. Artinya variabel Kompetensi Aparatur (X1), *Whistleblowing* (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), Budaya Organisasi (X4), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* (Y).

Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.200	9.545		1.383	.171
	Kompetensi_Aparatur	.079	.198	.043	.398	.692
	Whistleblowing	.328	.184	.171	1.780	.080
	Sistem_Pengendalian_Internal	-.062	.144	-.043	-.428	.670
	Budaya_Organisasi	.736	.120	.656	6.124	.000

Hasil dari uji parsial (t) menunjukkan bahwa hanya variable budaya organisasi yang dapat berpengaruh terhadap pencegahan fraud, sedangkan untuk variable kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dana Desa

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pertama (H1), diketahui bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada dana desa, dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,692 > \alpha (\alpha = 0,05)$ dan arah koefisien regresi bernilai positif yaitu sebesar 0,043. Hasil

dari pengujian hipotesis ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur dalam lingkup organisasi pemerintahan, yaitu tepatnya pada Balai Desa atau Kelurahan dalam kompetensi diri dari pamong maupun staff, akan tetapi tidak meningkatkan pencegahan terhadap tindakan fraud atau penyalahgunaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wonar dkk., (2018), Widiyarta dkk., (2017), Atmadja & Saputra, (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani dkk (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tinggi maupun rendah kompetensi apratur tidak mempengaruhi pencegahan fraud dikarenakan keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Dapat disimpulkan dari hasil pengujian diatas bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur di sebuah organisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

b. Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2), diketahui bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada dana desa, dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,080 > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) dan arah koefisien regresi bernilai positif yaitu sebesar 0,328. Hasil pengujian hipotesis ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi sistem *whistleblowing* pada organisasi pemerintah tidak meningkatkan pencegahan fraud pada dana desa. Hal ini disebabkan karena pemahaman mengenai *whistleblowing* sangat minim. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Somers & Casal, (2011) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh dikarekan enggan melaporkan tindakan fraud kepada pihak berwenang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori *stewardship* yang mana jika kepentingan antara pemangku kepentingan dan *steward* tidak sejalan, maka *steward* tidak akan

menentang. Ketika terjadi fraud aparat desa menunjukkan sikap tidak peduli dan enggan melaporkan, sehingga fraud yang terjadi dibiarkan dan pada akhirnya merugikan banyak pihak.

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3), diketahui bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud pada dana desa, dengan menunjukkan nilai signifikansi $0,670 > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) dan arah nilai koefisien regresi bernilai negative yaitu $-0,062$. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Wonar dkk.,(2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Hasil pengujian hipotesis ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian internal pada organisasi pemerintah tidak meningkatkan pencegahan fraud dana desa. Hal ini disebabkan karena efektifitas dari sistem pengendalian internal belum berjalan dengan baik. Terdapat mekanisme tentang sistem pengendalian internal pada desa, akan tetapi tidak berjalan dengan semestinya.

d. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4), diketahui bahwa Budaya Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada dana desa, dengan menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ ($\alpha = 0,05$) dan arah nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar $0,736$. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Zelmianti & Anita, (2015) , Suastawan dkk (2017) dan, Widiyarta dkk. (2017). Hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi budaya organisasi pada suatu organisasi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan guna menguji dan membuktikan secara empiris tentang kompetensi aparatur, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud dana desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 43 Balai Desa pada 17 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin, maka jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 70 kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana desa, *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa.

Saran

1. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dan bimtek di balai desa di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Memperluas wilayah penelitian dan penambahan variabel baru seperti moralitas aparat, pro-aktif fraud audit, dan kesadaran anti-fraud.
3. Menambahkan metode wawancara dan kriteria responden lama bekerja lebih dari 5 tahun.

Keterbatasan

1. Pengumpulan data dengan metode kuesioner terkadang menimbulkan bias di dalam pengisian kuesioner oleh responden.
2. Peneliti memiliki keterbatasan responden yaitu Kepala Desa sebagai responden utama dikarenakan dari beberapa desa yang dijadikan sampel ternyata sedang mengalami pergantian Kepala Desa.
3. Peneliti memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan tenaga dalam penyebaran kuesioner.

Daftar Pustaka

- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>
- Basri, S. A., Marsam, A. D., Majid, R. A., Abu, N. 'Asyiqin, & Mohamed, N. (2017). Reinforcement Tool of Whistleblowing to Eradicate Fraud in Public Sector. *SHS Web of Conferences*, 36, 00038. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600038>
- Calder, B. J. (1977). Endogenous-Exogenous Versus Internal-External Attributions: Implications for the Development of Attribution Theory. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 3(3), 400–406. <https://doi.org/10.1177/014616727700300308>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Francis, R. D., Armstrong, A. F., & Foxley, I. (2015). Whistleblowing: A three part view. *Journal of Financial Crime*, 22(2), 208–218. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0011>
- Gaurina, N. P. M., Purnamawati, I. G. A., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Bali Hai Cruises). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 10.
- Hevesi, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Governmen*. Diambil dari www.osc.state.ny.us
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesi. Jakarta.
- Indriani, I., Suroso, A., & Maghfiroh, S. (2016). *Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud*.
- Kristiana, W. L., Wahyuni, M. A., & Sujana, E. (2017). *Good Corporate Governance*. 7(1), 12.
- Kummer, T.-F., Singh, K., & Best, P. (2015). The effectiveness of fraud detection instruments in not-for-profit organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4/5), 435–455. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1083>

- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. (2015). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Sleman: Dianisa Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. (2008).
- Quah, J. S. T. (2011). Chapter 1 Corruption in Asian Countries: Causes, Consequences and Control Patterns. Dalam J. S. T. Quah (Ed.), *Research in Public Policy Analysis and Management* (Vol. 20, hlm. 1–33). [https://doi.org/10.1108/S0732-1317\(2011\)0000020008](https://doi.org/10.1108/S0732-1317(2011)0000020008)
- Raharjo, E. (2007). *TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI*. 2(1), 10.
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2019). *Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., & Putra, N. P. (2019). *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 9.
- Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17. <https://doi.org/DOI: 10.18196/jai.2016.0056.209-219>
- Somers, M., & Casal, J. C. (2011). Type of Wrongdoing and Whistle-Blowing: Further Evidence That Type of Wrongdoing Affects the Whistle-Blowing Process. *Public Personnel Management*, 40(2), 151–163. <https://doi.org/10.1177/009102601104000205>
- Suastawan, I. M. I. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah Di Kabupaten Buleleng)*. 7.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>

- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). *Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng*. 8(2), 10.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)*. 8(2), 12.
- Wonar, K., Falah, D. S., Si, M., Pangayow, B. J. C., & Si, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1, 27.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening*. 8, 10.

SURAT PERSETUJUAN

Assalaamu'alaikumwr. wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andri Shofiana Khoiriyah
NIM : 2016 042 0131
No. HP : 081 227 29 367 (nomor yang bisa dihubungi)
Email : andri.shofiana.89@gmail.com
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Tanggal yudisium : 18 Januari 2020
Judul Skripsi :
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR WHISTLE BLOWING, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DAN
DESA (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul)
Dosen Pembimbing : Dr. Ahim Abdurahim, M.Si., SAS., Ak., CA.

Menyatakan bahwa,

1. Bersedia/~~tidak bersedia~~* bekerjasama dengan dosen pembimbing untuk mengembangkan skripsi menjadi naskah publikasi yang layak untuk diterbitkan di jurnal/prosiding yang dituju
2. Bersedia/~~tidak bersedia~~* menjadikan dosen pembimbing sebagai penulis pertama dalam naskah publikasi yang telah diolah dan diformat ulang sesuai ketentuan jurnal/prosiding yang dituju

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikumwr. wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2020

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,

(~~Dr. Ahim Abdurahim, M.Si., SAS., Ak. CA~~)
NIK. 1970 11 26 1996 03 143 053

(Andri Shofiana Khoiriyah)

Mengetahui,



(Dr. Ahim Abdurahim, M.Si., SAS., Ak. CA.)
NIK. 1970 11 26 1996 03 143 053

*coret yang tidak perlu